



Rencana Ngutang Rp 5,7 Miliar

- Pembayaran Proyek Terancam Diundur
- Dampak Defisit Anggaran Pemkab Tabanan

TABANAN, TRIBUN BALI

- Pemkab Tabanan berencana mengundur pembayaran beberapa proyek. Ini karena terjadi defisit anggaran. Beberapa di antaranya adalah renovasi Gedung Kesenian I Ketut Mario, Taman Kota, dan panggung terbuka.

"Kami sudah sampaikan kepada kontraktor dan mereka mengerti terkait keuangan daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, Senin (9/10).

Pria yang akrab disapa Gus Wirat ini menyebutkan, nilai pengunduran pembayaran dilakukan sebesar 30 persen dari nilai total proyek. Akumulasi nilai uang yang belum bisa dibayarkan sekitar Rp 5,7 miliar.

"Tapi masih rencana, siapa tahu tiga bulan ke depan ada peningkatan pendapatan daerah atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Jika ada uangnya kami akan lang-

sung bayar," ucapnya.

Atas pertimbangan tersebut, Pemkab berencana membayar pengerjaan proyek yang terpendung pada 2017 di Januari 2018. Ia menyebutkan proses tersebut sudah ada aturannya. "Masuk pada anggaran induk 2018, detail aturannya bisa ditanyakan di bagian bendahara keuangan daerah," kata dia.

Informasi yang berhasil dihimpun, proyek pembangunan fisik yang pembayarannya dibon Pemkab Tabanan adalah, pengerasan jalan menuju TPP Senda yang nilai total proyeknya Rp 2,9 miliar. Perbaikan jalan ke Pura Malen nilai totalnya Rp 2,1 miliar. Rehab gedung DPRD Tabanan nilai total proyeknya Rp 820 juta. Kemudian rehab gedung Badan Keuangan Daerah nilai total proyeknya Rp 916 juta.

Proyek lainnya adalah, pembangunan tahap tiga museum Sagung Wah nilai total proyeknya Rp 2,5 miliar. Re-

hab gedung kesenian I Ketut Mario nilai total proyeknya Rp 7,7 miliar. Lanjutan penyelesaian panggung terbuka nilai total proyeknya Rp 3,4 miliar. Pembangunan Puskesmas Pembantu Luwus nilai total proyeknya Rp 520 juta. Pembangunan Puskesmas Pembantu Kesiut nilai total proyeknya Rp 475 juta, dan pembangunan puskesmas

pembantu Mekayu nilai total proyeknya Rp 419 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Nyoman Suratmika membenarkan ada tiga proyek di dinasnya yang akan mengalami pengunduran pembayaran meskipun sudah berjalan. "Ada tiga puskesmas pembantu di Luwus, Kesiut dan Mekayu," ujarnya. (arg)

Bisa Diatasi

PENUNDAAN pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Tabanan dari beberapa proyek telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. "Kan keuangan daerah tidak memungkinkan, tapi hal itu tercantum dalam Permendagri," ujar Kabid Pembendaharaan, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Ni Wayan Maryati.

Ia berjanji berusaha agar penundaan pembayaran tidak sampai terjadi. Bakeuda akan menghitung kembali dana yang dimiliki oleh Pemkab Tabanan pada Desember setelah dibayarkan gaji pegawai. "Kalau menurut saya bisa diatasi, siapa tahu ada peningkatan pendapatan daerah dari BPHT atau Pajak Hotel dan Restoran," jelasnya.

Situasi ini muncul selain karena pendapatan daerah menurun juga bantuan dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tabanan dipotong sepertiga dari total yang rencananya diterima. "Ada potongan sebesar Rp 4,8 miliar dan sudah dimulai sejak Oktober," ungkap dia. (arg)

Edisi

Selasa, 10 Okt 2017

Hal

17